

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

# MEMAHAMI DIMENSI *DIMENSI* KEMISKINAN MASYARAKAT ADAT



icco

# **MEMAHAMI DIMENSI-DIMENSI KEMISKINAN MASYARAKAT ADAT**

ICCO  
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Copyright © AMAN, ICCO 2010

Isi buku ini boleh direproduksi dan didistribusikan untuk keperluan non-komersil jika pemberitahuan sebelumnya telah disampaikan kepada pemegang hak cipta serta sumber dan nama-nama penulis dicantumkan.

Dipublikasikan oleh  
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),

ICCO  
ICCO: [www.icco.nl](http://www.icco.nl)  
AMAN: [www.aman.or.id](http://www.aman.or.id)

Editor  
Restu Achmaliadi  
Moh. Shohibuddin

Penulis  
Restu Achmaliadi  
Moh. Shohibuddin  
Angky Samperante  
George Sitania  
Kamardi  
Nus Uku

Foto-foto  
Dokumentasi AMAN

ISBN 978-979-17989-1-4

dicetak oleh Kippy

# PROLOG

## MEMAHAMI DIMENSI-DIMENSI KEMISKINAN MASYARAKAT ADAT

Oleh: Moh. Shohibuddin<sup>1</sup>

*"A relational view, then, understands poverty as the effect of social relations ... in terms of inequalities of power."*  
— David Mosse (2007)

### Perspektif Relasional Mengenai Kemiskinan

**T**anpa disadari, kita seringkali terjebak dalam satu cara pandang yang melihat masalah kemiskinan sebagai sebuah "kondisi", dan bukannya "konsekuensi".



Artinya, pandangan mengenai "kemiskinan" sebagai problem sosial disamakan dengan keadaan tertentu "si miskin" pada satu saat. Cara pandang itu memang memudahkan untuk dapat mengukur kemiskinan dari indikator-indikator yang bersifat generik, seperti kondisi tempat tinggal, jenis dan jumlah asupan gizi, tingkat pendapatan dan kepemilikan aset, dan sebagainya. Kemiskinan kemudian dilihat sebagai "atribut negatif" dari ukuran-ukuran ini dalam suatu

<sup>1</sup> Penulis adalah peneliti pada Sajogyo Institute (SAINS) Bogor, dan anggota Tim Pengajar mata kuliah "Kajian Agraria" pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB.



gradasi. Demikianlah, kondisi kemiskinan lantas dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Sebagai misal, kita mengenal istilah-istilah: Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III plus; yakni kategori-kategori yang biasa dipakai oleh pemerintah untuk menggambarkan tingkat-tingkat kesejahteraan keluarga.

Cara pandang non-relasional semacam itu biasanya memang menjadi “pegangan baku” para perencana kebijakan dan aparat penyelenggara pembangunan di lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi pembangunan internasional. Hal ini karena yang menjadi kepedulian utama mereka adalah bagaimana mengembangkan program-program intervensi yang bersifat generik untuk pengentasan kemiskinan sehingga indikator-indikator makro tentang kesejahteraan dan pembangunan manusia dapat dicapai (misalnya saja, pendapatan per kapita, partisipasi pendidikan, akses layanan kesehatan, dll).

Cara pandang demikian ini memang berguna untuk membuat “potret” orang miskin pada satu penggal waktu tertentu. Namun, ia akan “gagap” sama sekali untuk bisa memahami bahwa kondisi kemiskinan yang dipotret itu sebenarnya merupakan “endapan” dari proses-proses historis yang dinamis, sering dalam kurun waktu yang panjang, dengan berbagai kontinuitas maupun patahannya. Potret semacam itu pasti juga gagal menangkap bahwa kondisi kemiskinan, baik di level rumah tangga ataupun komunitas, sebenarnya memiliki perjalanan sejarah dan dinamika yang berbeda-beda dalam hal proses pembentukan, durabilitas dan bahkan juga reproduksinya. Sebagai misal, status dan kondisi kemiskinan boleh saja serupa pada berbagai komunitas adat. Namun, tanpa memahami proses pembentukannya dan mekanisme-mekanisme sosial yang membuat ketimpangan dan kemiskinan itu terus bertahan dan berlanjut (bahkan dicipta kembali), maka yang ditangkap sebenarnya hanyalah “hilir” dan “muara” permasalahan kemiskinan, sementara “hulu” yang menimbulkan kondisi kemiskinan itu dan “aliran-aliran” yang menjadi mekanisme-mekanisme produksi dan reproduksinya tidak akan dipahami dengan baik. Dalam hal demikian, maka penentuan level-level kesejahteraan ataupun introduksi program-program pengentasan kemiskinan yang konvensional dapat dipastikan hanya akan menyasar pada “symptom permasalahan” semata, sementara problem kemiskinan pada akarnya tidak tertangani secara baik (untuk tidak mengatakan dihindari sama sekali).

Secara praktis, konstruksi kemiskinan semacam di atas hanya akan mengantarkan pada “kebijakan ujung pipa” (Winoto 2008) dalam program-

program pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini pasti tidak akan mampu menghentikan proses reproduksi dan pelipatgandaan kemiskinan oleh kebijakan pembangunan yang berlangsung selama ini. Sebagai ilustrasi, suatu keluarga yang karena satu bantuan pemerintah (misalnya Bantuan Langsung Tunai) dapat naik ke satu jenjang peringkat kesejahteraan yang lebih tinggi, tidak ada jaminan sama sekali bahwa segera setelah itu ia tidak jatuh ke jenjang semula, atau bahkan lebih bawah lagi—selama kondisi dan lingkungan yang menyebabkan kemiskinannya tidak kunjung diatasi. Apa yang dialami desa-desa transmigran di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bisa menjadi contoh yang menarik di sini. Penduduk miskin dari Bali dan Lombok yang ditransmigrasikan ke daerah ini pada akhir 1970-an dan awal 1980-an telah sukses meningkatkan taraf hidup mereka menjadi jauh lebih sejahtera dibandingkan di kampung asal. Akan tetapi, pada awal 2000-an mereka dipaksa untuk direlokasikan ke tempat lain karena desa-desa mereka termasuk dalam Kuasa Pertambangan, yang entah bagaimana telah bertumpang tindih dengan areal transmigrasi.

Kelemahan cara pandang kemiskinan semacam ini menegaskan pentingnya perspektif yang lebih relasional di dalam melihat kemiskinan, yaitu dengan memandangnya sebagai “konsekuensi” dari relasi-relasi kuasa yang timpang yang menimbulkan marginalisasi satu kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks kemiskinan masyarakat adat, relasi-relasi kuasa itu terutama sekali melibatkan relasi antara negara dengan komunitas adat melalui berbagai aturan hukum dan kebijakan pembangunan yang diintrodusir dan dijalankan oleh pemerintah. Salah satu arena dari relasi kuasa itu, khususnya dalam konteks masyarakat agraris, adalah relasi-relasi agraria yang timpang di antara para subyek agraria (komunitas lokal, kelompok pendatang, negara, perusahaan, elit feodal, dll.).

Dengan menempatkan kemiskinan dalam konteks ketimpangan relasi kuasa di antara berbagai aktor ini, maka dimungkinkan untuk dapat disibakkan proses-proses historis yang “menciptakan ketimpangan distribusi kekuasaan, kemakmuran dan kesempatan di tengah masyarakat” (Du Toit dalam Mosse 2007). Dengan demikian, persoalan mengapa orang menjadi miskin, atau mengapa kemiskinan terus saja bertahan dan bahkan dicipta ulang, dapat ditelesuri secara lebih jernih proses-proses pembentukannya, yaitu sebagai hasil dari beroperasinya berbagai relasi kuasa yang timpang di antara berbagai pihak; ketimbang dilihat sebagai produk dari proses-proses sosial yang abnormal dan patologis.

### Dimensi-dimensi Kemiskinan yang Dimunculkan

Buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini menghimpun berbagai laporan hasil studi mengenai kemiskinan di empat lokasi di Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Studi ini dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam rangka memotret kondisi kemiskinan masyarakat adat di lokasi-lokasi penelitian serta mengangkat persepsi lokal mengenai indikator kemiskinan dan kesejahteraan. Secara ilustratif, laporan-laporan itu memberikan kesaksian mengenai proses historis dan dinamika sosial-ekonomi macam apa yang menimbulkan kemiskinan pada berbagai komunitas adat di tanah air. Laporan-laporan itu juga menemukan bahwa “wajah” kemiskinan di tiap-tiap komunitas adat ternyata berlainan dan terbentuk melalui proses sejarah yang berbeda-beda pula. Namun secara umum, intervensi negaralah (melalui ragam kebijakan dan program pemerintah) yang dituding sebagai faktor paling dominan yang telah melahirkan dampak perubahan besar pada kehidupan masyarakat lokal.

Masing-masing laporan ini berdiri sendiri dan menyoroti aspek-aspek kemiskinan dan kesejahteraan yang berbeda pada komunitas tinelitinya. Hal ini tampaknya disengaja oleh para pelaksana penelitian untuk memperoleh gambaran kemiskinan yang beragam, dan sekaligus untuk mengangkat konstruksi masyarakat adat mengenai makna dan kriteria kemiskinan dan kesejahteraan. Konstruksi lokal semacam ini memang biasanya luput dari perspektif kemiskinan yang bercorak linier dari para perencana kebijakan maupun aparat pelaksana program pembangunan di daerah, sehingga penelitian jenis ini diharapkan akan banyak memberikan kontribusi empiris yang mencerahkan.

Apabila dicermati, setidaknya ada lima dimensi kemiskinan yang diangkat oleh laporan-laporan studi yang dihimpun dalam buku ini. Pertama adalah dimensi kemiskinan yang terkait dengan persoalan identitas dan struktur sosial masyarakat adat yang khas. Inilah isu yang banyak disuarakan oleh AMAN dalam berbagai pernyataan dan publikasinya, yaitu menyangkut rekognisi negara atas identitas dan cara hidup komunitas adat. Ketiadaan rekognisi atas hal ini misalnya dalam agama resmi yang diakui negara, ataupun dalam berbagai pelayanan publik yang disediakan pemerintah, telah menyebabkan terjadinya krisis identitas dan budaya yang mencerminkan dimensi kemiskinan batiniah.

Dimensi kemiskinan yang kedua adalah menyangkut terbatasnya akses masyarakat adat pada pendidikan dan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah karena berbagai sebab. Salah satu faktor penyebab yang disoroti oleh laporan dari Jawa Tengah adalah bahwa pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah tidak memberi tempat pada nilai-nilai dan ideal kehidupan yang dijunjung oleh komunitas lokal. Akibatnya, pendidikan formal justru dilihat sebagai ancaman atas identitas dan kehidupan komunitas ini. Faktor-faktor lain tidak secara khusus ditonjolkan dalam laporan-laporan studi ini, dan biasanya merupakan kondisi yang umum dihadapi di daerah pedesaan yang terpencil, misalnya sarana dan prasarana yang terbatas, tenaga pendidikan dan medis yang terbatas dan kurang berkualitas, dan lain-lain.

Dimensi ketiga dan keempat berkaitan erat dengan kemiskinan yang bersangkutan paut dengan relasi-relasi agraria yang timpang, baik antara komunitas lokal dengan pihak-pihak dari luar (negara, korporasi, dan lain-lain) maupun di antara sesama warga komunitas itu sendiri. Relasi agraria yang merupakan dimensi kemiskinan ketiga berkenaan dengan persoalan

*tenurial security*, yakni penguasaan atas sumber-sumber agraria setempat dan jaminan keamanannya. Laporan dari NTB dan NTT secara khusus menyoroti dimensi ini, yakni kasus penetapan kawasan hutan lindung dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di wilayah adat tanpa didahului oleh proses konsultasi dan persetujuan dari komunitas adat setempat.

Adapun relasi agraria yang merupakan dimensi kemiskinan keempat berkaitan dengan relasi-relasi produksi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengusahaan sumber-sumber agraria setempat. Hal ini mencakup berbagai bentuk hubungan penyakapan (*tenancy*), perburuhan dan permodalan yang melibatkan sesama anggota komunitas sendiri maupun dengan pihak di luarnya. Aspek ini secara khusus disoroti oleh



laporan studi dari Aceh yang mengangkat meluasnya praktik-praktik hubungan penyakapan dan perburuhan yang tidak adil di antara sesama warga komunitas sendiri.

Akhirnya, tetapi bukan paling akhir, dimensi kemiskinan yang kelima terkait dengan isu keberlanjutan layanan alam. Isu ini mengemuka dari laporan penelitian di Aceh dan NTT yang menemukan terjadinya degradasi fungsi ekologis (khususnya terkait dengan wilayah catchment area) baik akibat dari konflik dan bencana alam (kasus di Aceh) maupun akibat dilanggarnya konsep tata ruang tradisional mengenai “tempat keramat” oleh kebijakan penetapan areal HGU oleh pemerintah. Dalam tabel berikut ini dijelaskan secara lebih rinci kelima dimensi kemiskinan di atas dan manifestasinya di masing-masing lokasi.

**Tabel 1**  
**Pemetaan Dimensi-dimensi Kemiskinan di Empat Lokasi Studi**

DIMENSI KEMISKINAN \ LOKASI PENELITIAN	ALUE CAPLI (PROVINSI ACEH)	SEDULUR SIKEP (PROVINSI JATENG)	BENTEK (PROVINSI NTB)	TANAH AI (PROVINSI NTT)
<b>1. KSE Terkait Struktur dan Organisasi Lokal</b>				
• Identitas Budaya		Tidak diakui dan dimarginalkannya cara hidup orang Samin	Mahalnya biaya upacara adat bagi komunitas pemeluk Budha dan Hindu Bali	
• Struktur Kepemimpinan			Komunitas pemeluk Budha dan Hindu Bali tidak mendapat akses pada kepemimpinan desa yang didominasi warga Muslim	
<b>2. KSE Terkait dengan Hak-hak Dasar</b>				
• Hak-hak Ekonomi	Kerawanan pangan	Program bantuan yang tidak sesuai dengan sistem kehidupan masyarakat	Program bantuan yang tidak sesuai dengan sistem kehidupan masyarakat	Kerawanan pangan
• Hak-hak Sosial dan Budaya	Terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan	Pengabaian hak untuk hidup menurut keyakinan dan budaya sendiri	Terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan	Terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan

• Hak-hak Sipil dan Politik	Konflik dan pelanggaran HAM	Pelayanan publik yang diskriminatif		Program resettlement yang berdampak buruk
<b>3. KSE Terkait Sistem Tenurial</b>				
• Akses dan Kontrol atas SDA			Penetapan hutan lindung tanpa konsultasi	Penetapan hutan lindung dan HGU tanpa konsultasi
• Differensiasi Agraria	Ketimpangan penguasaan tanah	Ketimpangan penguasaan tanah	Ketimpangan penguasaan tanah	
<b>4. KSE Terkait Hubungan Produksi</b>				
• Hubungan-hubungan Penyakapan	Sistem sewa dan gadai yang tidak adil			
• Hubungan-hubungan Perburuhan	Upah buruh yang rendah			
• Produktivitas Pertanian	Konversi sawah ke tambak (produksi pangan menurun); serangan virus udang			Pergeseran dari pola polyculture ke monoculture (tanaman komersial) --> produksi pangan terancam

*Diolah penulis dari laporan hasil studi di empat lokasi*

Pada bagian berikut ini, dari kelima dimensi kemiskinan di atas uraian akan difokuskan pada dimensi-dimensi yang terkait dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, yakni dimensi ketiga hingga keenam. Hal ini mengingat dimensi yang pertama dan kedua sudah banyak dikupas dalam berbagai publikasi AMAN sendiri (lihat: Kartika dan Gautama 1999, AMAN 2002 dan 2003).

### **Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan<sup>2</sup>**

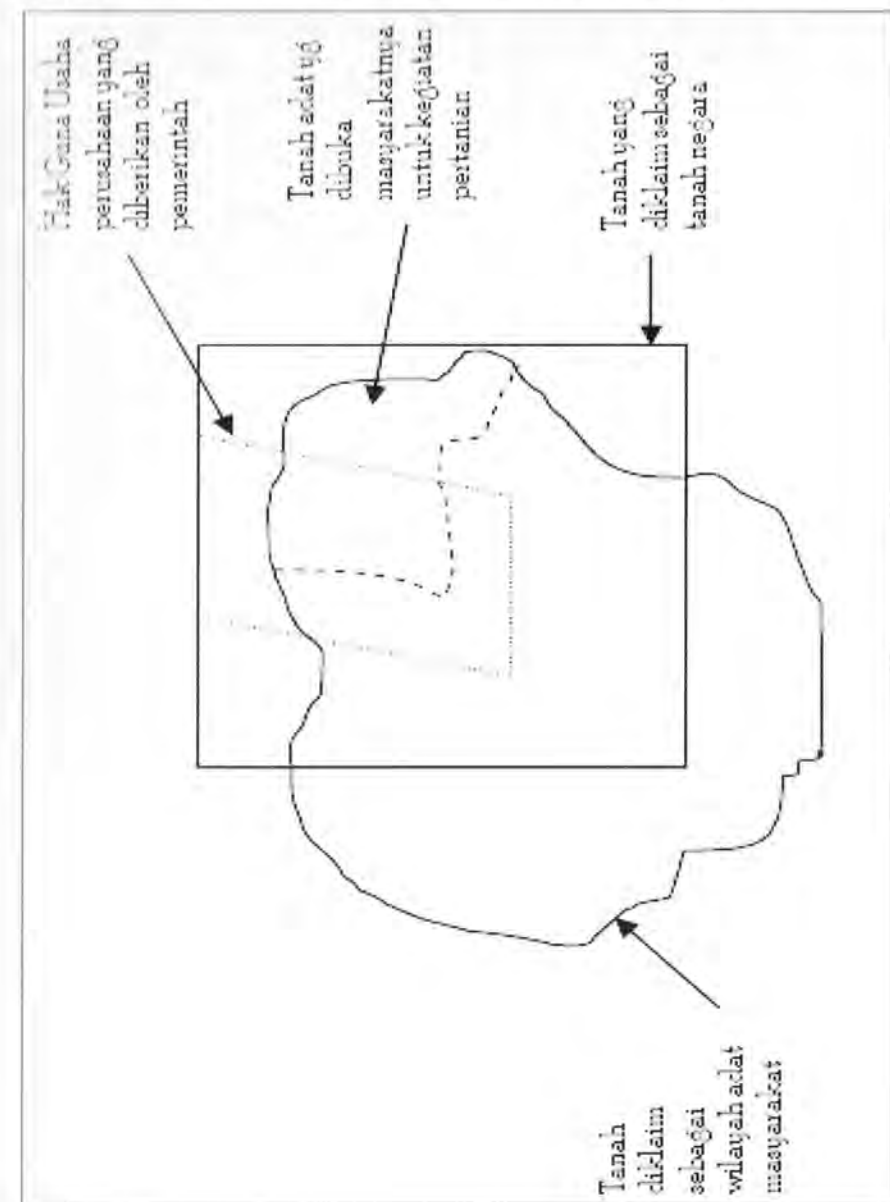
Kasus-kasus “pencaplokan” wilayah adat untuk dijadikan kawasan hutan dan perkebunan seperti dilaporkan oleh studi dari NTB dan NTT merupakan contoh kontemporer dari apa yang pernah Marx sebut sebagai

<sup>2</sup> Bagian ini banyak dicuplik dari tulisan Shohibuddin dan Soetarto (2009).



proses *enclosure*,<sup>3</sup> yaitu “sejarah pemisahan produser dari alat produksinya”; “ketika sejumlah besar orang tiba-tiba dicerabut secara paksa dari caranya menjalankan hidup, dan terlempar menjadi proletariat bebas yang ‘melulu bergantung’ pada pasar tenaga kerja” (dikutip dalam Fauzi, *in press*). Memang, bagi negara agraris seperti Indonesia, kepastian penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya (*land and resource tenure*) sangatlah penting karena hal itu merupakan “masalah penghidupan dan kemakmuran suatu bangsa” (meminjam judul buku Moch. Tauchid). Oleh karena itu, jaminan *tenurial security* atau perlindungan atas kepastian dan keberlangsungan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi keharusan tersendiri. Amanat konstitusi kita secara tegas menyatakan keharusan menjadikan tanah dan kekayaan alam yang dikandungnya sebagai sumber bagi “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 33 UUD 1945).

Masalah tenurial mencuat sebagai dimensi kemiskinan yang menonjol ketika terjadi suatu dominasi dalam relasi-relasi agraria menyangkut klaim penguasaan atas sumberdaya tertentu. Hal ini terjadi terutama karena aturan-aturan hukum yang dikeluarkan negara dalam menetapkan hak atas sebidang tanah dan sumber-sumber alam lainnya seringkali tidak mengadopsi atau bahkan bertolak belakang dengan praktik-praktik sehari-hari dan kebiasaan yang telah turun temurun berlaku dalam sebuah masyarakat. Di sinilah terjadi persoalan legitimasi penguasaan, yaitu antara yang berdasarkan *de jure* dan *de facto*. Legitimasi secara *de jure* mendasarkan pada kepemilikan formal menurut aturan hukum yang dianggap sah oleh negara atau pemerintah. Sedangkan legitimasi secara *de facto* mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, digunakan, dikenal dan berlaku berdasarkan hukum atau aturan yang dipraktikkan oleh masyarakat selama ini, misalnya berdasarkan praktik-praktik adat setempat (Afiff 2005). Afiff menggambarkan tumpang tindih klaim semacam ini melalui gambar sebagai berikut.



Dalam kaitan ini, maka momen historis pembentukan kemiskinan pada masyarakat adat sebenarnya bermula dari konflik tenurial semacam di atas, yaitu ketika dominasi negara dalam relasi-relasi agraria telah menyebabkan tercerabutnya hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan sumberdaya alam lainnya di satu sisi, dan di sisi lain terakumulasinya

3 Secara harfiah *enclosure* berarti pemagaran, namun yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses pergeseran penguasaan tanah yang mengakhiri hak-hak tradisional melalui mekanisme pengaplingan tanah-tanah yang berciri sumberdaya bersama menjadi tanah-tanah pribadi dengan batasan yang tegas.

penguasaan sumber-sumber agraria itu pada badan-badan usaha atau perorangan yang memiliki kekuatan modal besar. Seperti dijelaskan Fauzi (2002: 341):

“... penyebab utama dari konflik *tenurial* bersumber dari adanya dominasi suatu sistem penguasaan yang datang atau berasal dari hukum negara, yang secara sepihak memberikan layanan begitu besar pada pemilik-pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola sumber tanah dan sumberdaya alam lain termasuk hasil-hasil hutan. Sementara itu, hak-hak masyarakat setempat yang telah hidup dan mengembangkan suatu sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan sumberdaya alam lain tersebut diabaikan dan dilanggar dengan begitu saja.

Dengan demikian, problem kemiskinan dan krisis pedesaan yang banyak terjadi pada masyarakat lokal sebenarnya berakar dari “krisis agraria” semacam ini. Inilah krisis yang menyeruak seiring dengan terjadinya proses “ekspansi kapitalisme” ke dunia pedesaan pra-kapitalis; suatu proses transformasi besar (*great transformation*) yang secara drastis merombak relasi-relasi sosial dalam proses produksi, khususnya relasi kepemilikan (*property relations*). Dalam proses inilah tanah-tanah dan kekayaan alam mulai diputuskan dari relasi-relasi sosial pra-kapitalis, dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari modal dalam sirkuit cara produksi kapitalis. Di lain pihak, para petani yang pada mulanya memiliki hubungan erat dengan tanah dan kekayaan alam itu dilepaskan dari hubungan tersebut secara brutal, dan lantas dibiarkan lepas sebagai tenaga kerja bebas (Fauzi, *in print*).

Dalam literatur Marxian, proses inilah yang diistilahkan dengan “akumulasi primitif”, yaitu ketika kekayaan dan keuntungan diakumulasikan sebagai syarat perlu bagi terjadinya titik tolak perkembangan kapitalisme. Hal yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa proses akumulasi ini tidaklah berlangsung sekali jadi pada tahap awal perkembangan kapitalisme semata, namun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cara produksi kapitalis itu sendiri. Dengan demikian, dalam kasus masyarakat adat, proses akumulasi primitif ini tidak hanya berlangsung pada masa awal persentuhan dengan negara-negara Barat—mula-mula melalui hubungan perdagangan dan kemudian berlanjut menjadi dominasi dan penjajahan. Alih-alih, proses akumulasi ini, seperti ditunjukkan de Angelis (2004), tak lain adalah daya dari modal itu sendiri sebagai *enclosing social forces* atau kekuatan-kekuatan sosial yang menimbulkan proses pengkaplingan.

Proses ekspansi kapitalisme semacam inilah yang melahirkan proses marginalisasi dan terbentuknya kemiskinan pada masyarakat adat, namun juga pada masyarakat pedesaan secara umum. Seperti dikemukakan de Angelis (2004: 58), “... there is no enclosure of commons without at the same time the destruction and fragmentation of communities.” Dalam arti demikian, maka penetapan sepihak atas kawasan hutan dan perkebunan di wilayah masyarakat adat oleh pemerintah juga dapat disebut sebagai akumulasi primitif ini. Demikian pula, proses-proses perubahan agraria yang dipicu oleh introduksi komoditi global juga melibatkan bentuk-bentuk baru akumulasi primitif melalui proses pasar, seperti akan dijelaskan di bawah nanti.

Dalam kaitan ini, Wiradi (2009a) mengemukakan tiga jenis “ketimpangan agraria” yang tercipta dari proses ekspansi kapitalisme semacam di atas, yaitu: (1) ketimpangan dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah; (2) ketimpangan dalam hal peruntukan tanah; dan (3) ketimpangan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria.

Ketimpangan pertama bertumpu pada asumsi tidak seimbangannya rasio kuantitas dan kualitas antara pemilik dan penguasa tanah dengan mereka yang tidak memiliki tanah dan tidak mempunyai kuasa atas tanah. Ketimpangan kedua terkait dengan azas fungsi tanah. Ambisi pemerintah atas pencapaian industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang dihela oleh usaha skala modal besar telah menggeser prioritas pembangunan dari sektor pertanian ke industri yang padat modal. Peruntukan tanah diprioritaskan untuk mendukung industrialisasi ini sehingga tanah pertanian banyak dialihfungsikan kepada peruntukan industri, termasuk melalui pengusuran para petani kecil.

Adapun ketimpangan ketiga tampak dari pertarungan kepentingan dan klaim atas tanah antara negara melawan masyarakat adat. Klaim negara didasarkan pada konsep-konsep hukum positif (*formal/legal* dari Barat), sementara masyarakat adat berpijak pada berbagai hak atas tanah menurut konsepsi adat masing-masing. Di satu sisi rakyat menganggap tanah adalah tumpuan kehidupannya, sementara di sisi lain negara merasa berhak untuk meminta “pengorbanan” dari rakyat agar menyerahkan tanahnya demi “pembangunan” (cf. Gunawan 2008).<sup>4</sup>

4 Sepanjang sejarahnya, ekspansi kapitalisme yang melahirkan ketiga konteks ketimpangan di atas pada dasarnya merupakan sejarah perampasan tanah yang brutal; suatu sejarah “yang ditulis dengan tinta api dan darah” untuk meminjam istilah yang digunakan Karl Marx ketika membahas sejarah perampasan tanah (*enclosure*) di Inggris pada masa awal perkembangan kapitalisme.



Kesudahan dari pertarungan agraria dalam ketiga konteks ketimpangan di atas sudah dapat kita tebak, yaitu marjinalisasi komunitas adat dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti dipaparkan oleh berbagai laporan dalam buku ini, tampilan nyata dari marjinalisasi itu terlihat jelas pada merebaknya kemiskinan dalam sistem sosial mereka, sementara dalam sistem ekologis terjadi kerusakan dan degradasi lingkungan secara luas. Dengan dua tampilan tersebut maka potensi perkembangan “ko-evolusioner” antara dunia sosial dan dunia fisik pada komunitas adat pun meluruh, padahal potensi inilah yang awalnya menciptakan prakondisi bagi terwujudnya keseimbangan yang dinamis dalam interaksi komunitas adat dengan alam (cf. Noorgard 1994).

### Mencermati Ekspansi Kapitalisme “Dari Bawah”

Namun selain berlangsung “dari atas” berkat fasilitasi dan dukungan ekstra ekonomi dari negara (baik negara kolonial maupun pasca kolonial), ekspansi kapitalisme sebenarnya juga bisa berlangsung “dari bawah”, yakni melalui hubungan-hubungan agraris di antara anggota masyarakat sendiri menyangkut perebutan akses dan kontrol atas tanah, modal dan tenaga kerja. Seperti akan ditunjukkan di bawah, proses ekspansi kapitalisme “dari bawah” ini, tanpa ayal, juga telah berlangsung dengan massif pada masyarakat adat yang dampaknya tidak kalah besarnya dibandingkan proses ekspansi kapitalisme yang berlangsung “dari atas”.

Yang menarik adalah bahwa proses semacam ini juga berlangsung bahkan di dalam konteks aksi “reklamasi tanah dari bawah” (*land reform by leverage*), baik yang terorganisir maupun bukan. Banyak gerakan sosial pedesaan yang amat sadar diri dalam memobilisasi perlawanan kolektif terhadap “kapitalisme dari atas”, namun biasanya gagal mencermati proses-proses “kapitalisme dari bawah” yang berlangsung di antara mereka sendiri. Padahal yang terakhir ini juga dapat menimbulkan dampak akumulasi dan penyingkiran yang serupa dari proses yang pertama, hanya kali ini terjadi di antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat sendiri.

Secara singkat, proses akumulasi yang berlangsung dari bawah di antara masyarakat sendiri ini pada dasarnya terjadi melalui apa yang disebut sebagai “diferensiasi agraria”. White (1998: 20) mendefinisikan proses diferensiasi agraria ini sebagai:

“... suatu perubahan yang kumulatif dan permanen dalam berbagai cara di mana kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat desa—dan beberapa di luarnya—mendapatkan akses kepada hasil-hasil dari jerih payah tenaga kerjanya sendiri ataupun orang lain, menurut perbedaan penguasaan mereka atas sumber-sumber produksi, dan seringkali menurut ketimpangan yang kian meningkat dalam hal akses atas tanah”.

Berdasarkan definisi White di atas, menjadi jelas bahwa perbedaan akses sebagian penduduk desa atas tanah dan sumber-sumber produksi lainnya telah melahirkan adanya perbedaan kekuasaan di antara mereka di dalam mengekstraksi surplus produksi dan mengakumulasi kekayaan. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan pengelompokan kelas-kelas sosial-ekonomi yang makin menajam di pedesaan. Demikianlah, melalui proses diferensiasi agraria ini masyarakat desa yang semula relatif homogen berubah menjadi semakin terstratifikasi ke dalam kelas-kelas sosial ekonomi.

Apayangdisinggungdalamlaporanbukuini mengenai berkembangnya sistem gadai dan sewa tanah di Aceh yang amat mencekik adalah kisah kecil mengenai proses diferensiasi ini. Demikian pula, perbedaan sikap di antara warga Sedulur Sikep di Jawa Tengah dalam menyikapi bantuan dan program pemerintah juga merupakan “penanda” dari perubahan relasi-relasi agraria yang lebih besar yang sedang berlangsung di komunitas itu, dan tidak bisa dijelaskan hanya sebagai cerminan dari pergeseran moral dan identitas di antara mereka (cf. Hefner 1999). Sayangnya, proses perubahan agraria di pedesaan yang massif akibat berlangsungnya “kapitalisme dari bawah” ini juga tidak banyak diulas dalam laporan-laporan yang termuat di buku ini. Padahal proses itulah (selain penetrasi dari negara) yang juga menjelaskan mengapa terjadi perubahan kehidupan yang amat drastis di pedesaan, khususnya dalam hal penguasaan tanah dan hubungan produksi serta kesempatan kerja dan pendapatan.

Di banyak tempat, proses diferensiasi ini didorong oleh komersialisasi sistem pertanian yang kian meningkat, baik sebagai dampak intensifikasi pertanian pangan yang padat modal (melalui pelaksanaan Revolusi Hijau) ataupun introduksi komoditi ekspor (cash crop). Untuk kasus pertama, penelitian Survey Agro Ekonomi (SAE) pada dekade 1970-1980-an memberikan perbandingan menarik mengenai bagaimana proses perubahan agraria yang berlangsung pasca pelaksanaan Revolusi Hijau di desa-desa pertanian padi sawah. Secara padat, aspek-aspek perubahan agraria itu

diringkaskan oleh Wiradi (2009b: 136-137) sebagai berikut:

- Terjadinya proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui sewa-menyewa, gadai-menggadai, maupun melalui pemilikan dengan pembelian.
- Tingkat ketunakismaan yang bertambah tinggi. Kesempatan para tunakisma untuk dapat menguasai tanah melalui sewa-menyewa dan bagi hasil semakin terbatas karena ada kecenderungan para pemilik tanah lebih suka menggarap tanahnya sendiri daripada menggarapkannya (melalui sewa/bagi hasil) kepada orang lain.
- Walaupun umumnya proporsi pendapatan dari sektor non-pertanian lebih besar daripada yang bersumber dari sektor pertanian, namun luas kepemilikan tanah ternyata berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan. Ini berarti bahwa jangkauan terhadap sumber-sumber di luar sektor pertanian lebih dimiliki oleh para pemilik tanah luas daripada pemilik tanah sempit atau lebih-lebih para tunakisma.
- Pada strata pemilikan tanah yang sempit dan tunakisma terdapat proporsi rumah tangga miskin yang lebih besar. Dengan demikian berarti bahwa pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan.

Sementara itu, untuk kasus kedua, studi Tania Li tentang “booming komoditas kakao” di dataran tinggi Sulawesi Tengah memberikan perbandingan menarik mengenai bagaimana proses komersialisasi pertanian yang didorong oleh introduksi komoditi pasar. Dengan merujuk pada komunitas Lauje, Li (2002: 422) menunjukkan bahwa:

“Introduksi tanaman komersial di wilayah perbukitan komunitas Lauje telah memotong siklus perladangan berpindah. Pohon kakao mulai ditanam di tanah ladang berpindah bersama-sama dengan tanaman jagung, dan terus diulang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada lagi ladang yang tersisa. Dan seiring dengan transformasi lanskap ini terjadi pula transformasi sosial yang berlangsung dalam tiga tahap. Hal ini mencakup *enclosure*, komoditisasi, dan akumulasi yang timpang (*uneven accumulation*) atas tanah, hingga pada satu titik di mana banyak petani Lauje secara efektif saat ini menjadi tuna wisma.

Lebih lanjut, tiga tahapan proses diferensiasi agraria seiring dengan introduksi tanaman kakao ini diuraikan secara rinci oleh Li sebagai berikut (2002: 422-423):

“Tahap transformasi pertama adalah privatisasi tanah melalui penyingkiran ahli waris lainnya; tindakan menanam pohon kakao pada ladang berpindah akan membuatnya tertutup bagi orang lain, dan akan mengeluarkannya dari ladang yang menjadi warisan bersama sebuah keluarga besar. Pada serbuan penanaman tahap awal, petani yang lebih banyak mempunyai modal, tenaga kerja dan pengetahuan genealogis mengenai di mana leluhurnya dulu pernah membuka hutan mampu mengkonsolidasikan penguasaan atas areal tanah yang luas. Sebaliknya, mereka yang lebih lambat memulai, dan mereka yang tidak memiliki klaim warisan leluhur, gagal memiliki tanah...”

“Pada tahap kedua, tanah yang telah diprivatisasi melalui penanaman kakao, mulai diperlakukan sebagai komoditi yang dapat dijual ke pihak ketiga, suatu transaksi yang secara umum dianggap permanen. Para petani yang terdesak oleh kebutuhan uang tunai menjual areal belukar yang baru mereka tanami kakao kepada tetangganya yang lebih mampu, satu bidang tanah pada satu saat, sampai mereka kini mendapati diri mereka menjadi buruh upah pada tanah yang pernah menjadi milik mereka...”

“Tahap ketiga adalah berlangsungnya proses konsentrasi dan penyisihan, yaitu ketika para elit dari dataran rendah dan pengusaha dari kota yang mempunyai banyak modal membeli kebun-kebun kakao di dataran tinggi...”

Dari perbandingan dua kasus di atas dapat terlihat dengan jelas bagaimana cara dan mekanisme perubahan agraria yang terjadi seiring berlangsungnya *capitalism from below*, dan pengaruhnya pada pembentukan kemiskinan dan kesenjangan di tengah penduduk pedesaan. Memang, pada tataran empiris, proses-proses transformasi kehidupan, sumber nafkah dan basis sumberdaya masyarakat pedesaan selalu dibentuk dan didorong oleh kedua kekuatan ini sekaligus (“kapitalisme dari atas dan dari bawah”). Oleh

karena itu, perhatian terhadap keduanya, terutama mekanisme-mekanisme yang menciptakan akumulasi di satu sisi dan pemiskinan di sisi lain, harus dilakukan secara berimbang. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai proses-proses agraria yang berlangsung di lapangan dan kekuatan-kekuatan pengarahnya dalam kedua arus kapitalisme tersebut (dari atas dan dari bawah).

### Identifikasi Krisis Agraria pada Masyarakat Adat

Berkaitan dengan urgensi di atas, maka menjadi tantangan tersendiri bagi AMAN untuk merintis pengembangan instrumen identifikasi krisis agraria pada masyarakat adat untuk dapat menemukan akar, proses, mekanisme dan tampilan dari kemiskinan relasional yang berlangsung pada berbagai komunitas adat. Tantangan serupa dalam konteks yang berbeda juga pernah dikemukakan oleh Tania Li (2001) yang menyatakan bahwa hanya melalui pemahaman atas proses perubahan agraria seperti itu maka pola-pola dan sebab-sebab kemiskinan dan ketimpangan pada komunitas lokal dapat lebih dijernihkan. Dan dari pemahaman semacam inilah menurut Li baru dimungkinkan adanya respon-respon yang lebih politis (dan bukan sebatas manajerial) pada berbagai level, termasuk dalam konteks strategi gerakan sosial.

Tantangan semacam ini perlu direspon oleh AMAN, khususnya belajar dari pengalaman gerakan-gerakan petani yang terlibat dalam berbagai aksi reklamasi tanah atau *land reform by leverage*. Banyak kasus menunjukkan bahwa pasca okupasi tanah ternyata proses-proses akumulasi, penyisihan dan diferensiasi agraria juga berlangsung di tengah-tengah para pelaku aksi reklamasi ini yang mengingkari semangat keadilan agraria yang mereka perjuangkan. Temuan awal riset Sajogyo Institute bersama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun 2009 ini misalnya menemukan bahwa para pelaku reklamasi tanah di dataran tinggi Jawa Barat ternyata gagal memahami struktur ekonomi sayur mayur yang dicirikan oleh pasar output yang monopsonistik dan pasar input yang monopolistik sebagai struktur ketidakadilan agraria yang harus ditentang. Bahkan patronase yang tidak adil antara bandar-petani kecil juga berkembang luas di antara para petani pelaku reklamasi ini sendiri, sedemikian rupa sehingga proses akumulasi kekayaan dan diferensiasi agraria juga sudah mulai terlihat mencolok.

Dalam konteks urgensi di atas, tulisan ini ingin menawarkan suatu kerangka penelitian yang dapat mengintegrasikan variabel-variabel dinamis yang berkaitan dengan soal tenurial, hubungan-hubungan produksi, keberlanjutan layanan alam, dan organisasi sosial untuk dapat mengidentifikasi kondisi *socio-economic insecurity* suatu masyarakat secara lebih komprehensif dan relasional. Untuk itu, sebagai uraian penutup, pada bagian di bawah ini akan disajikan empat dimensi kerentanan sosial-ekonomi (*socio-economic insecurity*) sebagai suatu “denominator umum” untuk mencirikan relasi-relasi agraria dan yang terkait yang menentukan kondisi kemakmuran dan kemiskinan masyarakat. Empat dimensi kerentanan sosial-ekonomi (KSE) dimaksud secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kerentanan yang terkait dengan penguasaan tanah dan sumberdaya lainnya (*land and resource tenure*);
2. Kerentanan dalam konteks relasi-relasi produksi;
3. Kerentanan dalam konteks keberlanjutan layanan alam; dan
4. Kerentanan yang terkait dengan relasi-relasi kuasa dalam isu organisasi sosial dan kepemimpinan.

Dalam tabel berikut ini disajikan secara lebih rinci variabel-variabel apa saja yang akan menentukan keamanan atau kerentanan sosial-ekonomi suatu masyarakat dalam keempat dimensi di atas.





Tabel 2

## Variabel-variabel Dinamis Penentu Kerentanan Sosial-Ekonomi (KSE)

KSE Terkait Penguasaan Tanah dan Sumberdaya Alam Lainnya (TSL)	KSE Terkait Relasi-relasi Produksi	KSE Terkait Keberlanjutan Layanan Alam	KSE Terkait Isu Organisasi dan Kepemimpinan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Akses dan kontrol atas TSL dan ketimpangannya</li> <li>Dasar-dasar klaim atas TSL dan ketimpangannya</li> <li>Dimensi gender dalam penguasaan TSL dan ketimpangannya</li> <li>Kaitan tipe-tipe tata guna tanah dengan kepastian/kerentanan tenurial</li> <li>Isu pluralisme hukum &amp; pengaruhnya terhadap kepastian/kerentanan tenurial</li> <li>Pengaruh pengakuan formal dalam bentuk sertifikasi terhadap kepastian/kerentanan tenurial</li> <li>Diferensi agraria dan kelas-kelas sosial-ekonomi di desa</li> <li>Proses-proses transformasi yang terjadi dalam konteks perubahan ekonomi politik dan ekologi yang lebih luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubungan-hubungan penyakapan dan pola interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat</li> <li>Hubungan-hubungan perburuhanan dan pola interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat</li> <li>Perubahan kelembagaan penyakapan dan hubungan kerja dan faktor-faktor penyebabnya</li> <li>Dimensi gender dalam hubungan-hubungan produksi</li> <li>Transformasi kesempatan kerja pedesaan akibat perubahan sistem produksi, alih komoditi, perubahan bentang alam, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persepsi mengenai alam, kepemilikan, dan akses yang didefinisikan secara bertahap menurut latar belakang budaya dan kelas</li> <li>Setting kelembagaan yang mempengaruhi pola interaksi manusia dengan alam</li> <li>Transformasi alam akibat perubahan pola produksi, komoditi, rezim pengelolaan, dll</li> <li>Isu-isu terkait dengan daya dukung ekologi dan perubahan iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relasi-relasi kuasa terkait otoritas dan legitimasi</li> <li>Relasi-relasi kuasa terkait elit dan orang biasa</li> <li>Relasi-relasi kuasa terkait etnis asli dan etnis pendatang</li> <li>Relasi-relasi kuasa antara lelaki dan perempuan</li> <li>Relasi-relasi kuasa antar komunitas desa</li> <li>Relasi-relasi kuasa terkait kesenjangan generasi dan isu keberlanjutan antar generasi</li> <li>Relasi-relasi kuasa antara komunitas desa dengan lingkungan ekologi politik yang lebih luas (pemerintah, LSM, dll)</li> </ul>

Kerangka penelitian di atas barulah merupakan sebuah inventarisasi variabel-variabel kunci yang harus dikembangkan lebih lanjut konseptualisasi dan teorisasinya. Bagaimanapun, hal itu dapat menjadi langkah awal untuk melihat bagaimana relasi-relasi agraria merupakan proses kunci dalam melihat bagaimana akumulasi kekayaan terjadi dengan sisinya yang lain adalah terciptanya marginalisasi dan kemiskinan.

## Penutup

Uraian di atas telah menunjukkan berbagai dimensi kemiskinan dan arti penting krisis agraria sebagai faktor penting pembentuk kemiskinan dalam konteks masyarakat agraris. Atas dasar itu, maka pemahaman atas krisis agraria itu dan perjuangan merombaknya harus menjadi bagian dari strategi dasar AMAN dalam menjawab problem kemiskinan pada masyarakat adat.

Pada bagian penutup ini penulis ingin mengundang para pendukung dan pelaku gerakan masyarakat adat untuk mengembangkan instrumen yang memadai guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses-proses diferensiasi agraria yang telah berlangsung pada berbagai komunitas adat di tanah air. Dalam kaitan ini, empat kelompok variabel penentu kerentanan sosial-ekonomi yang diajukan di atas adalah sumbangan penulis yang bisa dijadikan titik tolak untuk diperbaiki, dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan instrumen dimaksud. Penulis percaya bahwa hanya dengan menyadari persoalan krusial ini dan mengembangkan kemampuan untuk menemukannya, maka proses-proses yang mendasari pembentukan kemiskinan dan marginalitas pada masyarakat adat dapat diterangi dan dijernihkan, sehingga respon pada berbagai tingkatan (*multi-layers*) dan yang melibatkan lintas pelaku (*cross-borders*) dapat diupayakan secara lebih tepat dan efektif.

Tantangan kini terpulang kepada AMAN untuk mewujudkan undangan di atas. Apabila hal ini dapat dilakukan, dan jawaban menyeluruh atas keempat dimensi kerentanan sosial-ekonomi di atas bisa diupayakan, maka di situlah dapat diperlihatkan dengan jelas bahwa “perjuangan atas identitas” dan “perjuangan atas tanah” merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam gerakan AMAN. Semoga!

## Daftar Bacaan

- Aliff, Suraya (2005) "Tinjauan atas Konsep 'Tenure Security', dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-Kasus di Indonesia." *Jurnal Wacana*, Edisi 20, Tahun VI: 225-247.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (2002) *Keharusan Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat*. Jakarta: Sekretariat AMAN.
- AMAN (2003) *Satu yang Kami Tuntut: Pengakuan*. Jakarta: ICRAF, Sekretariat AMAN, Forest Peoples Programme.
- Burkard, Günter (2008) "'Stability' or 'Sustainability'? Changing Conditions of Socio-economic Security and Processes of Deforestation in a Rainforest Margin" in Günter Burkard and Michael Fremerey (eds) *A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi*, Indonesia. Berlin: Lit Verlag.
- De Angelis, Massimo (1999) "Marx's Theory of Primitive Accumulation: A Suggested Reinterpretation." Working Paper No. 29, Department of Economics, University of East Anglia London, <http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/PRIMACCA.htm>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2009.
- De Angelis, Massimo (2004) "Separating the Doing and the Deed: Capital and the Continuous Character of Enclosures." *Historical Materialism* 12(2): 57-87.
- Fauzi, Noer (2002), "Konflik Tenurial: yang Diciptakan Tapi Tak Hendak Diselesaikan" dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (eds), *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fauzi, Noer (in press) "Desentralisasi dan Community Driven Development dalam Konteks Pembangunan Kapitalis: Suatu Kajian Teoritis." Akan dimuat dalam Majalah Prisma.
- Gunawan, Bondan (2008) "Mengurai Benang Kusut Agraria: Menuju Kemakmuran dan Keadilan bagi Masyarakat Adat di Indonesia." Makalah disampaikan dalam Muswil Aliansi Masyarakat Adat Babel, 11 April 2008.
- Hefner, Robert W (1999) *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKiS.
- Kartika, Sandra dan Candra Gautama (1999) *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*. Jakarta: AMAN.

- Li, Tania M. (2001) "Agrarian Differentiation and the Limits of Natural Resource Management in Upland Southeast Asia." *IDS Bulletin*, 32(4): 88-94.
- Li, Tania M. (2002) "Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi." *Development and Change* 33(3): 415-437.
- Mosse, Adam (2007) "Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of the Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty." Working Paper 107, Chronic Poverty Research Centre.
- Norgaard, R. (1994) *Development Betrayed: The End of Progress and a Coevolutionary Revisioning of the Future*. London and New York: Routledge.
- Shohibuddin, Moh. dan Endriatmo Soetarto (2009) "Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan: Menuju Pandangan Relasional Mengenai Kemiskinan". Dimuat dalam Buku Peringatan 70 Tahun Prof. Djoko Suryo. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Shohibuddin, Moh. dan Soeryo Adiwibowo (2009) "Sejauh Mana Upaya-upaya Kolaborasi Bisa Koadaptif? Kasus Kesepakatan Konservasi Berbasis Adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah." Paper disampaikan pada Lokakarya Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam, diselenggarakan atas kerjasama WWF Indonesia dengan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB, 29-30 Oktober 2009.
- White, Ben (1989) "Problems in the Empirical Analysis of Agrarian Differentiation" in G. Hart, A. Turton, B. White (eds) *Agrarian Transformation: Local Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Wiradi, Gunawan (2009a) *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Edisi Baru. Penyunting: Noer Fauzi, penyelarar Edisi Baru: Moh. Shohibuddin. Jakarta, Bogor, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, AKATIGA.
- Wiradi, Gunawan (2009b) *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Penyunting: Moh. Shohibuddin. Bogor: Sajogyo Institute, Pusat Kajian Agraria dan Departemen Sains KPM IPB.